

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Perkembangan inflasi di Provinsi Sumatera Barat pada Triwulan IV Tahun 2025, sebagai berikut :

1. Pada Oktober 2025, kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi month-to-month (m-to-m) sebesar 0,47%, menjadi penyumbang terbesar inflasi bulanan dengan andil 0,16 poin persen dari total inflasi m-to-m 0,40%, Kenaikan harga terutama dipicu oleh cabai merah yang memberikan andil dominan (0,57%), diikuti ikan cakalang, daging ayam ras, wortel, dan pepaya. Sebaliknya, beberapa komoditas pangan mengalami deflasi, seperti bawang merah, tomat, cabai rawit, jengkol, dan berbagai jenis sayuran. Secara keseluruhan, inflasi pangan m-to-m Oktober 2025 mencerminkan tekanan jangka pendek akibat volatilitas harga komoditas hortikultura, khususnya cabai, yang sensitif terhadap pasokan dan faktor musiman.
2. Pada November 2025, Provinsi Sumatera Barat mengalami deflasi m-to-m sebesar 0,24%, yang terutama dipengaruhi oleh deflasi pada kelompok pangan (makanan, minuman, dan tembakau) sebesar -0,90% dengan andil -0,30 poin persen terhadap inflasi bulanan. Penurunan harga pangan ini menunjukkan adanya perbaikan pasokan komoditas utama pasca lonjakan harga pada bulan sebelumnya. Komoditas yang paling dominan mendorong deflasi pangan adalah cabai merah dengan andil -0,32%, diikuti jengkol, kentang, cabai hijau, cabai rawit, tomat, petai, kacang panjang, jeruk nipis, terong, dan udang basah. Penurunan harga komoditas hortikultura tersebut mencerminkan panen yang lebih baik dan distribusi yang relatif lancar.
3. Pada Desember 2025, Provinsi Sumatera Barat mengalami inflasi month-to-month (m-to-m) sebesar 1,48%, meningkat signifikan dibandingkan bulan sebelumnya. Inflasi ini didominasi oleh kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang mencatat inflasi 3,68% (m-to-m) dengan andil 1,24%, menjadikannya sumber utama kenaikan harga bulanan. Komoditas pangan yang paling mendorong inflasi antara lain bawang merah, cabai rawit, cabai merah, beras, daging ayam ras, dan telur ayam ras. Lonjakan harga tersebut berkaitan erat dengan curah hujan tinggi dan kejadian bencana alam (banjir dan longsor) di beberapa sentra produksi dan jalur distribusi Sumatera Barat pada akhir November-Desember 2025, yang menghambat panen, distribusi, dan meningkatkan biaya logistik.

Selain faktor bencana, peningkatan permintaan menjelang Natal dan Tahun Baru turut memperkuat tekanan harga pangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa inflasi Desember 2025 bersifat musiman dan berbasis gangguan pasokan, sehingga memerlukan respons cepat TPID melalui pengamanan pasokan, kelancaran distribusi, dan stabilisasi harga pangan strategis.

Secara keseluruhan, inflasi Triwulan IV 2025 membentuk pola “rendah-turun-melonjak”. Deflasi November bersifat sementara, sedangkan lonjakan Desember menunjukkan bahwa inflasi Sumatera Barat sangat rentan terhadap gangguan pasokan pangan akibat bencana alam. Kondisi ini menegaskan pentingnya penguatan pengendalian inflasi pangan berbasis mitigasi bencana, kelancaran distribusi, dan pengamanan stok, khususnya menjelang HBKN

dan puncak musim hujan.

Inflasi pangan mendominasi sepanjang triwulan, dengan kontribusi andil rata-rata 2.77% terhadap headline y-on-y. Komoditas utama:

- **Cabai merah:** Penyumbang terbesar setiap bulan (Oktober: 1.94%, November: 1.63%, Desember: 1.61%), akibat fluktuasi pasokan musiman.
- **Cabai rawit dan bawang merah:** Naik signifikan di Desember (masing-masing 0.19% dan 0.21%), setelah deflasi di November.
- **Beras dan daging ayam ras:** Muncul kuat di Desember (0.18% dan 0.12%), menandakan tekanan akhir tahun.
- **Lainnya:** Santan segar, minyak goreng, dan rokok konsisten berkontribusi, mencerminkan campuran faktor produksi dan konsumsi.

## 2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Pada periode triwulan IV tahun 2025, permasalahan utama inflasi di Provinsi Sumatera Barat terletak pada *volatilitas* harga pangan, khususnya komoditas hortikultura. Pada Oktober 2025, inflasi pangan m-to-m masih didorong lonjakan cabai merah dan ikan, menunjukkan gangguan pasokan dan faktor musiman. Sebaliknya, November 2025 terjadi deflasi pangan tajam (-0,90% m-to-m) akibat penurunan harga cabai dan sayuran yang menunjukkan ketergantungan tinggi pada panen musiman.

Kondisi Sumatera Barat saat yang ini mengalami bencana hidrometeorologi yang berimbas dengan permasalahan gangguan Produksi dan Distribusi Pangan akibat banjir dan longsor yang meluas mengakibatkan akses ke lahan pertanian, pasar lokal, dan jaringan transportasi terganggu atau terputus, sehingga pasokan bahan pangan pokok ke pasar lokal berkurang dan biaya logistik meningkat.

Kerusakan Infrastruktur Pasar dan Gudang Infrastruktur yang rusak dapat menimbulkan kerugian pasokan di hilir, memengaruhi harga jual komoditas pangan segar, terutama bahan yang membutuhkan rantai dingin atau cepat rusak.

Permintaan Pangan Mendesak di Wilayah Terdampak Penduduk yang mengungsi atau kehilangan sumber makanan mungkin meningkatkan permintaan fiskal terhadap bahan pokok tertentu, mendorong harga naik terutama di daerah yang pasokannya tipis.

Tekanan Harga m-to-m Inflasi pangan dengan gangguan logistik dan pasokan, dapat terjadi kenaikan relatif di indeks inflasi pangan bulan November–Desember 2025, bahkan jika inflasi umum tetap moderat-fokus ini penting untuk mitigasikan dalam analisis perekonomian Sumatera Barat.

## 3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Dalam rangka menjaga daya beli masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan agar inflasi tetap terjaga, tim pengendalian inflasi Sumatera Barat selama Triwulan IV tahun 2025 telah melakukan berbagai upaya diantaranya sebagai berikut :

### 1. Keterjangkauan Harga

Pada periode Oktober-November melaksanakan Operasi Pasar Murah/Gerakan Pangan

1. Murah oleh Dinas Pangan bersama TTIC;
2. Penyaluran bantuan pangan murah oleh Perum Bulog Kanwil Sumatera Barat masih terus dilakukan sebelum masa kebencanaan Sumbar dan dilanjutkan dengan penyaluran bantuan ke daerah-daerah terdampak bencana.
3. Penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk meringankan beban akibat kenaikan harga.
4. Subsidi harga komoditas pangan melalui sinergi dengan Pemkab/Pemko dan CSR swasta.

#### **1. Ketersediaan Pasokan**

1. Pengadaan bibit cabe, bawang merah, padi dan jagung oleh Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam rangka meningkatkan produksi;
2. Menyiapkan lahan baru untuk peningkatan produksi pangan;
3. Meningkatkan produksi hasil pertanian dan hilirisasinya;
4. Penguatan cadangan pangan daerah melalui koordinasi dengan OPD ketahanan pangan;
5. Menjaga ketersediaan komoditas pangan dengan mengatur kalender tanam sesuai dengan waktu kemungkinan tingginya kebutuhan dan permintaan, terutama pada momen tertentu;
6. Mendorong dalam perencanaan tanam agar mempedomani neraca pangan;
7. Mengoptimalkan kerjasama perdagangan bahan pangan dengan Provinsi penghasil komoditi pangan, seperti cabe merah dan bawang merah.

#### **2. Kelancaran Distribusi**

1. Melakukan optimalisasi distribusi pangan dengan pemulihan dan dukungan akses transportasi untuk distribusi pangan oleh OPD Dinas Perhubungan dan PUPR;
2. Pendistribusian beras SPHP dan stok pangan komersil oleh Bulog;
3. Intensifikasi distribusi komoditas pangan strategis oleh Toko Tani Indonesia Center (TTIC);
4. Perbaikan sarana dan prasarana jalur distribusi terdampak bencana oleh OPD terkait dan Pengawasan serta akses logistik dalam memastikan terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat Sumbar;
5. Optimalisasi KAD antar dan intra daerah surplus ke daerah defisit;
6. Mendorong pelaksanaan KAD luar Provinsi dan antar Kabupaten/Kota dalam provinsi;
7. Mendorong pelaksanaan Kerjasama antar daerah, karena secara prognosa neraca pangan Sumatera Barat untuk 6 bulan kedepan mengalami surplus setiap bulannya seperti beras, jagung, bawang merah, cabe merah, daging ayam ras dan telur ayam;

##### **1. Komunikasi Efektif**

1. Mengikuti rapat koordinasi mingguan pengendalian inflasi yang difasilitasi Kemendari setiap minggu;
2. Menyiapkan bahan paparan pimpinan untuk rapat koordinasi mingguan pengendalian inflasi;
3. Menerima Kunjungan Kerja DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai bidang Perekonomian dalam rangka Koordinasi dan Konsultasi terkait Inflasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tanggal 17 Oktober 2025;
4. Menerbitkan Surat Gubernur Nomor 500/274/X/Ro-Eko.Setda/2025 tanggal 17 Oktober 2025 perihal Tindak Lanjut HLM TPID Triwulan III Tahun 2025;
5. Melaksanakan Rakor Inflasi pada tanggal 7 November 2025 dengan agenda

kegiatan Upaya Pengendalian Inflasi dalam rangka menyambut Hari Besar Keagamaan (HBKN) Natal 2025 dan Tahun Baru 2026;

6. Melaksanakan HLM TPID se Sumatera Barat Triwulan IV tahun 2025 pada tanggal 11 Desember 2025;
7. Menerbitkan Surat Gubernur Nomor 500/287/XII/Ro-EkoSetda/2025 perihal Tindak Lanjut HLM Pengendalian HLM Inflasi Triwulan IV Tahun 2025;

#### 4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Bebagai kegiatan yang dilaksanakan dan diikuti pada Triwulan IV tahun 2025 diantaranya rapat teknis pengendalian inflasi, High Level Meeting, Rapat Koordinasi yang difasilitasi oleh Kemendagri dan beberapa kegiatan lainnya dalam rangka pengendalian inflasi seperti gerakan pangan murah, fasilitasi ongkos angkut oleh bank Indonesia, Koordinasi Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat maupun provinsi tetangga, serta penyaluran bantuan sosial bagi yang berdampak bencana alam di Sumatera Barat.

Berbagai kegiatan tersebut diatas dalam rangka upaya dan langkah yang dilakukan dalam kegiatan pengendalian inflasi pada periode triwulan IV Tahun 2025. Secara umum selama triwulan IV inflasi Sumatera Barat relatif terkendali dan ini tidak terlepas dari komitmen serta kolaborasi tim pengendalian inflasi dengan stakeholder terkait dalam menjaga realisasi inflasi sesuai target dan sasaran inflasi nasional yakni  $2,5 \pm 1\%$ .

Kegiatan inflasi Sumatera Barat tidak terlepas dari kerja aktif Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumatera Barat yang secara konsisten melaksanakan strategi pengendalian inflasi berbasis 4 pilar utama 4K : Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di Provinsi Sumatera Barat :

1. Komitmen TPID Sumatera Barat TPID Sumbar secara rutin memaparkan strategi pengendalian inflasi untuk menjaga laju inflasi tetap dalam target  $2,5 \pm 1\%$  (yoy), termasuk melalui *pasar murah/pasar pangan murah*, pemantauan harga/pasokan, serta koordinasi lintas sektor. TPID juga mempercepat perbaikan akses distribusi pascabencana serta prioritas kendaraan logistik untuk bahan pangan.
2. Fokus Komoditas Pangan Strategis Evaluasi internal oleh pemerintah dan DPR menunjukkan pengendalian perlu lebih fokus pada beberapa komoditas pemicu seperti cabai merah, bawang merah, ayam, dan telur karena volatilitasnya yang tinggi di Sumbar.
3. Penguatan Strategi & Kolaborasi Bank Indonesia Sumbar menyoroti kebutuhan memperkuat kerja sama antar daerah dan intensifikasi program harga murah yang tepat sasaran, serta komunikasi publik untuk penyebaran informasi pasar murah.
4. Koordinasi dan Rapat Teknis TPID aktif melakukan koordinasi bersama Kemendagri dan instansi terkait melalui rapat *virtual* dan pertemuan terintegrasi, menunjukkan adanya upaya harmonisasi kebijakan pusat-daerah.
5. Kelemahan & Tantangan Kebijakan

Secara kebijakan, pengendalian inflasi di Sumatera Barat melalui TPID dan kolaborasi lintas sektor sudah berjalan dengan banyak kegiatan konkret. Namun, fokus yang lebih tajam pada *komoditas pangan volatile*, data harga *real-time*, dan penguatan cadangan/distribusi pasca-krisis sangat penting untuk meningkatkan efektifitas pengendalian inflasi dalam konteks

tantangan lokal seperti kebencanaan dan gangguan pasokan.

## 5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Bebagai kegiatan yang dilaksanakan dan diikuti pada Triwulan IV tahun 2025 diantaranya rapat teknis pengendalian inflasi, High Level Meeting, Rapat Koordinasi yang difasilitasi oleh Kemendagri dan beberapa kegiatan lainnya dalam rangka pengendalian inflasi seperti gerakan pangan murah, fasilitasi ongkos angkut oleh bank Indonesia, Koordinasi Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat maupun provinsi tetangga, serta penyaluran bantuan sosial bagi yang berdampak bencana alam di Sumatera Barat.

Berbagai kegiatan tersebut diatas dalam rangka upaya dan langkah yang dilakukan dalam kegiatan pengendalian inflasi pada periode triwulan IV Tahun 2025. Secara umum selama triwulan IV inflasi Sumatera Barat relatif terkendali dan ini tidak terlepas dari komitmen serta kolaborasi tim pengendalian inflasi dengan stakeholder terkait dalam menjaga realisasi inflasi sesuai target dan sasaran inflasi nasional yakni  $2,5 \pm 1\%$ .

Kegiatan inflasi Sumatera Barat tidak terlepas dari kerja aktif Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumatera Barat yang secara konsisten melaksanakan strategi pengendalian inflasi berbasis 4 pilar utama 4K : Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di Provinsi Sumatera Barat :

1. Komitmen TPID Sumatera Barat TPID Sumbar secara rutin memaparkan strategi pengendalian inflasi untuk menjaga laju inflasi tetap dalam target  $2,5 \pm 1\%$  (yoy), termasuk melalui *pasar murah/pasar pangan murah*, pemantauan harga/pasokan, serta koordinasi lintas sektor. TPID juga mempercepat perbaikan akses distribusi pascabencana serta prioritas kendaraan logistik untuk bahan pangan.
2. Fokus Komoditas Pangan Strategis Evaluasi internal oleh pemerintah dan DPR menunjukkan pengendalian perlu lebih fokus pada beberapa komoditas pemicu seperti cabai merah, bawang merah, ayam, dan telur karena volatilitasnya yang tinggi di Sumbar.
3. Penguatan Strategi & Kolaborasi Bank Indonesia Sumbar menyoroti kebutuhan memperkuat kerja sama antar daerah dan intensifikasi program harga murah yang tepat sasaran, serta komunikasi publik untuk penyebaran informasi pasar murah.
4. Koordinasi dan Rapat Teknis TPID aktif melakukan koordinasi bersama Kemendagri dan instansi terkait melalui rapat *virtual* dan pertemuan terintegrasi, menunjukkan adanya upaya harmonisasi kebijakan pusat-daerah.
5. Kelemahan & Tantangan Kebijakan

Secara kebijakan, pengendalian inflasi di Sumatera Barat melalui TPID dan kolaborasi lintas sektor sudah berjalan dengan banyak kegiatan konkret. Namun, fokus yang lebih tajam pada *komoditas pangan volatile*, data harga *real-time*, dan penguatan cadangan/distribusi pasca-krisis sangat penting untuk meningkatkan efektifitas pengendalian inflasi dalam konteks tantangan lokal seperti kebencanaan dan gangguan pasokan.